

PENGARUH INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEMAMPUAN DIGITAL APARATUR TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA PALOPO

Anwar Hasan^{1*}, Antong², Muh Yusuf Q³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Palopo, Kota Palopo, Indonesia
fayyadhfilzah@gmail.com^{1*}, antong.cib@gmail.com², myusuf@umpalopo.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh infrastruktur teknologi informasi (TI) dan kemampuan digital aparatur terhadap keterbukaan informasi publik di instansi pemerintah. Di era transformasi digital, ketersediaan perangkat keras dan jaringan yang mumpuni menjadi fondasi utama dalam mendistribusikan data secara transparan. Namun, aspek teknis tersebut harus diimbangi dengan kompetensi digital aparatur guna mengelola platform informasi secara efektif dan responsif. Menggunakan metode kuantitatif, hasil studi menunjukkan bahwa infrastruktur TI dan kemampuan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas keterbukaan informasi. Sinergi antara teknologi canggih dan sumber daya manusia yang literat digital terbukti mampu meminimalisir hambatan birokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.

Kata Kunci: Informasi, Literat, Publik, Pemerintah, Teknologi

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Information Technology (IT) infrastructure and the digital competence of government officials on public information disclosure in government institutions. In the era of digital transformation, the availability of robust hardware and networks serves as the primary foundation for distributing data transparently. However, these technical aspects must be balanced with the digital competence of officials to manage information platforms effectively and responsively. Using quantitative methods, the study's results indicate that IT infrastructure and digital competence have a positive and significant impact on the quality of information disclosure. The synergy between advanced technology and digitally literate human resources is proven to minimize bureaucratic hurdles and enhance public trust in government governance.

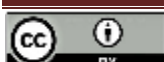
Keywords: Government, Information, Literate, Public, Technology

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap prinsip ini melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Namun, implementasi keterbukaan informasi di berbagai daerah masih belum optimal. Berdasarkan laporan tahunan Komisi Informasi Pusat (KIP) tahun 2023, hanya sekitar 45% badan publik yang dinilai "informatif", sisanya masih berada pada kategori "cukup informatif" hingga "tidak informatif". Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan struktural dan kompetensial dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.

Salah satu kendala utama dalam keterbukaan informasi publik adalah belum meratanya infrastruktur teknologi informasi yang memadai di berbagai instansi pemerintah daerah. Tanpa dukungan infrastruktur yang layak, sistem informasi manajemen tidak dapat berfungsi secara optimal dan justru menambah beban kerja staf yang menghambat kinerja birokrasi karena sistem sering mengalami gangguan atau downtime (Ridwan, Patulak, & Lajaria, 2025). Selain itu, keterampilan digital aparatur juga menjadi faktor penting. Aparatur yang belum memiliki keterampilan digital yang baik akan kesulitan dalam penerapan teknologi informasi dan sistem e-government (Renanda & Rosidin 2025).

Penelitian - penelitian sebelumnya umumnya menyoroti faktor transparansi dan partisipasi publik dari sisi kebijakan dan regulasi (Sofwan, 2022) yang membedah transparansi dari sisi



aturan hukum, atau fokus pada peran teknologi informasi yang pada awalnya lebih banyak dikaji sebagai alat untuk menguatkan pengawasan pengelolaan keuangan negara (Muhlizi, 2016). Namun, belum banyak studi yang secara spesifik menguji hubungan antara kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan keterampilan digital aparatur terhadap keterbukaan informasi publik secara bersamaan, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Palopo. Inilah yang menjadi celah penelitian yang ingin diisi oleh studi ini.

Dari pembahasan diatas, Keterbaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi dua variabel strategis yaitu faktor teknologis (Infrastruktur TI) dan kompetensi SDM dalam satu model pengaruh terhadap keterbukaan informasi publik, yang belum banyak diteliti secara empiris. dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulang teori yang sudah ada, tetapi memberikan verifikasi empiris terbaru mengenai bagaimana sinergi teknologi dan kapasitas SDM dapat mengatasi hambatan struktural dalam keterbukaan informasi publik ditingkat daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis sejauh mana infrastruktur teknologi informasi dan keterampilan digital aparatur mempengaruhi keterbukaan informasi publik dalam konteks pemerintahan daerah terkhusus pada Pemerintah Daerah Kota Palopo. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi kontribusi masing-masing faktor secara terpisah maupun simultan terhadap efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pentingnya kesiapan teknologi dan kompetensi digital aparatur dalam mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi Pemerintah Kota Palopo. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan kapasitas teknologi dan peningkatan literasi digital aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan partisipatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Keterbukaan Informasi Publik

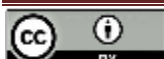
Keterbukaan informasi publik berkembang sebagai respons terhadap persoalan asimetri informasi antara pemerintah dan warga. Dalam banyak konteks, pemerintah memegang dominasi atas data dan arsip sehingga masyarakat kesulitan menilai kinerja, efektivitas anggaran, dan

integritas kebijakan. Upaya keterbukaan hadir untuk memperkecil kesenjangan tersebut sekaligus memperkuat akuntabilitas. Namun, praktik dilapangan kerap menunjukkan pergeseran fokus pada kepatuhan administratif semata membentuk PPID, menyiapkan SOP, atau memublikasikan sejumlah dokumen tanpa disertai perbaikan kualitas informasi seperti keterbacaan, kelengkapan metadata, format terbuka, dan pembaruan berkala.

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan gambaran bahwa keterbukaan informasi publik memiliki implikasi nyata terhadap akuntabilitas pemerintahan, kepercayaan publik, serta kualitas layanan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Ricky dan Rahimallah (2022) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik sejatinya akan berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Selanjutnya, Azka dkk. (2022) menyimpulkan bahwa demi mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pemerintah bertekad menerapkan keterbukaan informasi publik sdalam sistem pemerintahan.

Dari sisi teori kebijakan, penelitian Chairunnisa, Habibi, dan Berthanila (2023) memberikan pemahaman bahwa keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik ditentukan oleh dua faktor, yaitu konten kebijakan dan konteks kebijakan. Konten kebijakan mencakup kejelasan tujuan, prosedur, serta sumber daya yang tersedia. Sementara konteks kebijakan meliputi komitmen politik, kapasitas organisasi, serta dukungan lingkungan sosial. Studi pada beberapa daerah menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah jelas, keterbukaan informasi sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dan rendahnya komitmen pimpinan. Penelitian lain oleh Cahya dan Wibawa (2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal, sebagaimana harapan masyarakat, akan mengurangi esensi tujuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu salah satu upaya yang harus segera dilakukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima adalah mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam sudut pandang ekonomi makro, keterbukaan informasi publik berfungsi sebagai instrumen stabilitas dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Teori Ekspektasi Rasional, pelaku ekonomi membentuk ekspektasi



masa depan berdasarkan seluruh informasi yang tersedia. Transparansi data makro (seperti target inflasi atau defisit anggaran) memungkinkan masyarakat menyesuaikan perilaku konsumsi dan investasi secara akurat, sehingga meminimalkan guncangan ekonomi akibat kebijakan mendadak. Peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dengan cara mengumumkan informasi data perdagangan strategis secara berkala di pengumuman informasi publik melalui laman resmi pemerintah atau aplikasi teknologi informasi terkait lainnya sehingga masyarakat dapat melihat kondisi dan situasi terkini serta memprediksi yang akan terjadi dimasa yang akan datang (Jati, 2022).

Dari sudut pandang ekonomi mikro, keterbukaan informasi publik berkaitan erat dengan teori Asimetri Informasi. Teori Asimetri Informasi menyatakan bahwa ketimpangan informasi antara pemerintah sebagai penyedia layanan publik dan masyarakat sebagai pengguna layanan dapat menimbulkan inefisiensi serta kegagalan. Ketika pembeli tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi kualitas produk, mereka cenderung membayar harga rata-rata, akhirnya menurunkan insentif bagi produsen untuk menawarkan produk berkualitas tinggi (Putri, 2025). Keterbukaan informasi publik berfungsi untuk mengurangi kesenjangan informasi tersebut, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang rasional dan optimal, baik dalam mengakses layanan publik maupun dalam berpartisipasi pada proses pengambilan kebijakan.

Kemudian dari sudut pandang Teori Pertumbuhan Ekonomi, keterbukaan informasi publik dipandang sebagai faktor kelembagaan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori pertumbuhan klasik menekankan peran akumulasi modal dan efisiensi alokasi sumber daya sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi. Modal merupakan urat nadi perekonomian bagi pelaku usaha, untuk mendapatkan akses informasi permodalan, pelaku usaha membutuhkan informasi publik setiap saat (Rosyid, 2014)

Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur teknologi informasi merupakan komponen dasar yang menopang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam teknologi komunikasi dan informasi terdapat dua komponen utama yaitu hardware dan software (keduanya dijalankan oleh brainware milik manusia), perangkat keras sebagai komponen yang bergerak dan perangkat lunak sebagai

komponen penggerak (Rusmana, 2003). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, infrastruktur teknologi informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, serta mekanisme keamanan informasi yang memungkinkan terselenggaranya layanan publik berbasis digital, termasuk keterbukaan informasi pembangunan daerah. Menurut Bulutoding dan Amiruddin (2014) Pengguna sistem adalah manusia yang secara psikologi memiliki suatu perilaku tertentu yang melekat pada dirinya, sehingga aspek keprilakuan dalam konteks manusia sebagai pengguna teknologi informasi menjadi penting sebagai faktor penentu pada setiap orang yang menjalankan teknologi informasi.

Isu-isu yang muncul dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi sektor publik antara lain kesenjangan kualitas jaringan antar wilayah, lemahnya integrasi sistem informasi, keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan, serta kerentanan terhadap ancaman keamanan siber. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam publikasi data pembangunan daerah dan rendahnya kualitas layanan keterbukaan informasi publik.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Penelitian yang dilakukan oleh Islami (2021) menyimpulkan bahwa komponen penyebaran data memiliki tantangan pada kesiapan infrastruktur digital, yaitu pembangunan pusat data terpadu dan pembangunan satu aplikasi yang bisa dipakai oleh semua institusi pemerintah pusat dan daerah, serta tantangan kurangnya kompetensi data.

Fenomena di Indonesia menunjukkan kesesuaian dengan kajian tersebut. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk aplikasi perencanaan dan penganggaran, membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat agar data pembangunan dapat dipublikasikan secara konsisten. Banyak pemerintah daerah telah mengembangkan portal *open data* untuk menyediakan indikator pembangunan, dokumen RPJMD, dan laporan realisasi program. Namun, masalah keterbatasan server, lemahnya integrasi antar-aplikasi, dan *downtime* saat akses publik tinggi masih sering terjadi, yang menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur.

Dengan demikian, landasan teori dan temuan empiris menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi merupakan faktor penting

yang mempengaruhi keterbukaan informasi publik di bidang perencanaan pembangunan daerah. Infrastruktur teknologi informasi yang kuat, didukung oleh tata kelola yang baik dan keterampilan digital aparatur, akan mampu mewujudkan transparansi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

H₁: Infrastruktur teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Palopo.

Keterampilan Digital Aparatur

Dalam era transformasi digital pemerintahan (e-government), keterampilan digital aparatur menjadi salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah. Penerapan e-Government di Indonesia mengalami kendala disebabkan salah satunya adalah pada komponen aparat (Qamaruddin dan Iskandar, 2021). Isu yang muncul adalah masih adanya kesenjangan literasi digital aparatur, sehingga meskipun infrastruktur teknologi informasi telah tersedia, pemanfaatannya belum optimal dalam mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat. Aparatur dituntut tidak hanya mampu mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga memiliki kompetensi dalam mengelola data, menyajikan informasi secara terbuka, serta menjaga keamanan dan etika informasi. Kompetensi digital memiliki pengaruh terbesar terhadap Smart ASN yang menandakan bahwa kemampuan aparat dalam mengoperasikan teknologi dan memahami sistem digital menjadi faktor kunci dalam menghadapi tuntutan digitalisasi birokrasi (Saraswati, Widanti, dan Dewi, 2025).

Landasan teori yang mendasari pentingnya keterampilan digital aparatur dapat dijelaskan melalui kerangka Digital Competence Framework (DigComp 2.2) yang menekankan lima aspek, yaitu literasi informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi, pembuatan konten digital, keamanan, serta pemecahan masalah. Teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) juga menjelaskan bahwa adopsi sistem informasi publik dipengaruhi oleh kompetensi dan keyakinan pengguna terhadap kemudahan serta manfaat penggunaan teknologi, sehingga keterampilan digital aparatur berperan dalam meningkatkan penerimaan dan pemanfaatan sistem keterbukaan informasi.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan relevansi pentingnya keterampilan digital

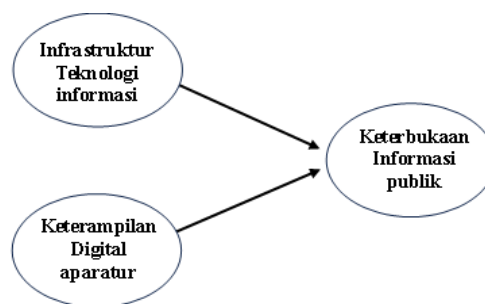
aparatur. Penelitian di lingkungan pemerintahan daerah Indonesia menemukan bahwa literasi digital ASN berhubungan erat dengan kualitas layanan publik, termasuk kemampuan menyajikan informasi pembangunan secara transparan dan akuntabel. Studi lain juga menunjukkan bahwa kompetensi digital aparatur mendukung efektivitas implementasi e-government dan open government data (OGD), karena aparatur yang terampil lebih mampu mengelola, memvalidasi, dan mempublikasikan data pembangunan secara terbuka. Temuan penelitian internasional pun menegaskan bahwa kemampuan digital pegawai publik menjadi faktor kunci keberhasilan transparansi dan partisipasi warga dalam platform pemerintahan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi keterampilan digital aparatur, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

H₂ : Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah Keterampilan digital aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Palopo.

Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran; pengaruh infrastruktur teknologi informasi dan keterampilan digital aparatur terhadap keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Palopo.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Pendekatan ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen, yaitu infrastruktur teknologi informasi (X_1) dan keterampilan digital aparatur (X_2), terhadap variabel dependen yaitu keterbukaan informasi publik (Y) secara empiris dan terukur.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup

Pemerintah Kota Palopo yang berjumlah 49 OPD. Setiap OPD diwakili oleh satu orang responden dengan kriteria: 1) ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV Kepala Sub Bagian Perencanaan, yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan informasi, penyusunan perencanaan, koordinasi penyusunan pengisian sistem (e-monev, e-planning, dan e-sakip); 2) telah bekerja minimal satu tahun di instansi tempat bekerja hingga saat ini.

Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil dan masih memungkinkan untuk dijangkau secara keseluruhan, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh (sensus). Dengan teknik ini, seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian, sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, yaitu sebanyak 49 responden, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jenis OPD	Jumlah OPD	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Badan	7	7	7
2	Dinas	28	28	28
3	Inspektorat	1	1	1
4	Sekretariat	2	2	2
5	RSUD	1	1	1
6	Satuan	1	1	1
7	Kecamatan	9	9	9
	Total	49	49	49

Tabel 2. Tabel Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
1	Infrastruktur Teknologi Informasi (X ₁)	Komponen dasar yang menopang sistem pemerintahan berbasis elektronik	1. Ketersediaan perangkat keras (hardware); 2. Ketersediaan perangkat lunak/aplikasi; 3. Kualitas jaringan internet; 4. Sistem informasi internal terintegrasi dengan baik; 5. Keamanan dan penyimpanan data; 6. Dukungan teknis dan pemeliharaan sistem	Likert 1-5
2	Keterampilan Digital Aparatur (X ₂)	Kemampuan teknis untuk menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem operasionalisasi digital secara efektif	1. Kemampuan menggunakan aplikasi perkantoran; 2. Kemampuan mengoperasikan sistem informasi pemerintahan; 3. Pengelolaan dokumen dan data digital; 4. Literasi digital dan pencarian informasi; 5. Pemahaman keamanan data dan etika digital; 6. Kemampuan menyelesaikan masalah teknis ringan	Likert 1-5
3	Keterbukaan Informasi Publik (Y)	Kewajiban hukum bagi badan publik untuk memberikan akses informasi yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat mengenai	1. Aksesibilitas informasi publik; 2. Kelengkapan dan kejelasan informasi; 3. Pembaruan informasi secara berkala; 4. Tanggungjawab terhadap permintaan informasi; 5. Ketersediaan saluran pengaduan dan umpan balik;	Likert 1-5

Sumber: Dokumen RKPD Kota Palopo 2025

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui instrumen kuesioner. Kuesioner disusun dalam bentuk skala Likert 5 poin, mulai dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju". Selain itu, data sekunder berupa dokumen kelembagaan dan laporan tahunan instansi pemerintah daerah digunakan sebagai bahan pendukung.

Operasionalisasi Variabel

Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel Infrastruktur Teknologi Informasi (X₁): diukur melalui indikator ketersediaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan internet, dan sistem informasi internal. Variabel Keterampilan Digital Aparatur (X₂): diukur berdasarkan kemampuan penggunaan aplikasi kerja, pengelolaan data digital, pemanfaatan sistem informasi pemerintahan, dan literasi keamanan siber. Variabel Keterbukaan Informasi Publik (Y): diukur melalui indikator aksesibilitas informasi, kecepatan penyampaian, akurasi konten informasi, dan partisipasi publik. Setiap indikator diterjemahkan menjadi beberapa butir pertanyaan pada kuesioner untuk memperoleh data yang dapat dianalisis secara kuantitatif, berikut tabel operasionalisasi variabel:

	penyelenggaraan negara.	6. Partisipasi masyarakat dalam memperoleh informasi	
--	-------------------------	--	--

Sumber: Diolah dari berbagai literatur (2025)

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Smart PLS. Metode ini dipilih karena mampu menguji hubungan kausalitas antar variabel laten yang kompleks, termasuk pengaruh langsung, tidak langsung. Selain itu, Smart PLS sesuai untuk penelitian dengan jumlah sampel relatif kecil, distribusi data yang tidak normal, serta model yang bersifat prediktif.

Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah regresi linier berganda, secara fungsional persamaan regresi ketiga variabel yang diteliti terdiri atas Infrastruktur Teknologi Informasi (ITI) (X_1): terkait ketersediaan perangkat keras, jaringan, dan perangkat lunak di OPD, Keterampilan Digital Aparatur (KDA) (X_2): Kemampuan teknis ASN dalam mengoperasikan sistem digital, dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Y): total dari persepsi responden mengenai transparansi dan kemudahan akses informasi di OPD, yang diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Analisis difokuskan untuk menguji pengaruh langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen, baik dari segi kekuatan hubungan maupun signifikansinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Berganda

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Hasil uji ini dapat menunjukkan nilai variabel yang tinggi pada sampel, yang berarti standar error juga besar. Akibatnya, ketika nilai koefisien diuji, t-hitung akan lebih kecil dari t-tabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel bebas atau bebas dari gejala multikolinearitas. Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model regresi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Nilai VIF < 10 atau Nilai Tolerance > 0,01 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

- Jika Nilai VIF > 10 atau Nilai Tolerance < 0,01 maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.

Hasil uji Multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Collinearity statistics

Model	VIF
ITI	1.472
KDA	1.472

Sumber: Data diolah oleh penulis dengan Smart PLS

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel ITI (X_1) dengan nilai VIF sebesar 1.472 atau > 0,01. Variabel KDA (X_2) dengan nilai VIF sebesar 1.472 atau > 0,01, maka hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi perbedaan varian dari satu observasi ke observasi lainnya. Uji ini digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.
- Jika nilai signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas.

Hasil uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Breusch-Pagan Test

	Test-Statistic	df	P value
Breusch-Pagan Test	2.022	2	0.364

Sumber: Data diolah oleh penulis dengan Smart PLS

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diatas, nilai P-value sebesar 0,364 atau > 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Uji Koefisien Jalur antar variable

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur antar variabel independent dan dependen dengan menggunakan *bootstrapping* dalam SmartPLS, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Jalur
Summary Coefficients

	Unstandardized coefficients	Standardized coefficients	SE	T value	P value	2.5 %	97.5 %
ITI	0.447	0.439	0.129	3.459	0.001	0.187	0.707
KDA	0.362	0.346	0.133	2.723	0.009	0.095	0.630
Intercept	4.136	0.000	3.297	1.255	0.216	2.492	10.764

Sumber: Data diolah oleh penulis dengan Smart PLS

Berdasarkan hasil uji koefisien jalur diatas, Pengaruh Infrastruktur Teknologi Informasi (ITI) (X1), nilai koefisien terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Y) adalah sebesar 0,439 dengan nilai P-Value sebesar 0,001 atau <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Insfrastuktur Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keterbukaan Informasi Publik.

Pengaruh Kemampuan Digital Aparatur (KDA) (X2) terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Y) adalah sebesar 0,346 dengan

nilai P-Value sebesar 0,009 atau <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Kemampuan Digital Aparatur juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil Uji Analisis Varian (Anova)

Analisis varian bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Hasil uji analisis varian pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6, Hasil Uji Analisis Varian
Anova

	Sum square	df	Mean square	F	P value
Total	998.000	49	0.000	0.000	0.000
Error	514.247	47	10.941	0.000	0.000
Regression	483.753	2	241.877	22.106	0.000

Sumber: Data diolah oleh penulis dengan Smart PLS

Berdasarkan hasil uji analisis varian diatas, nilai P-Value sebesar 0,000 atau < 0,05, artinya variabel Insfrastruktur Teknologi Informasi (X₁) dan Kemampuan Digital Aparat (X₂) berpengaruh signifikan terhadap variabel Keterbukaan Informasi Publik (Y).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-square)

Hasil pengujian Koefisien Determinasi (R-square) menunjukkan seberapa besar variabel independent dapat menjelaskan variabilitas variabel dependen.

Hasil uji Koefisien Determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi
R-square

	KIP
R-square	0.485
R-square adjusted	0.463
Durbin-Watson test	1.875

Sumber: Data diolah oleh penulis dengan Smart PLS

Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi diatas, Nilai R-square sebesar 0,485 menunjukkan bahwa variabel Infrastruktur Teknologi Informasi dan Kemampuan Digital Aparatur secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pada Keterbukaan Informasi Publik sebesar 48,5%.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, infrastuktur teknologi informasi dan kemampuan digital aparat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kota Palopo. Uji hipotesis menunjukkan bahwa Infrastruktur Teknologi Informasi memiliki nilai signifikansi 0,001 < 0,05 dan Kemampuan Digital Aparatur memiliki nilai signifikansi 0,009 < 0,05, yang mengindikasikan bahwa kedua variabel ini secara parsial memiliki pengaruh yang kuat dan nyata dalam memengaruhi keterbukaan informasi publik.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan semakin tinggi kemampuan digital aparat, maka tingkat keterbukaan informasi publik pada instansi pemerintahan juga semakin meningkat.

Pengaruh Infrastruktur Teknologi Informasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Infrastruktur Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Palopo. Artinya, peningkatan kualitas infrastruktur

teknologi informasi, seperti jaringan internet yang andal, perangkat keras dan lunak yang memadai, serta sistem informasi yang terintegrasi, mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi publik kepada masyarakat.

Secara umum, beberapa manfaat utama dari peningkatan ini meliputi: 1). Peningkatan efisiensi operasional badan publik dalam mengelola dan menyebarluaskan informasi; 2). Meningkatkan aksesibilitas bagi warga, memungkinkan mereka mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, yang didukung oleh ketersediaan akses internet yang stabil; 3). Membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi, yang mengarah pada partisipasi publik yang lebih baik dalam proses pemerintahan; 4). Mengurangi kesenjangan digital dengan menyediakan infrastruktur yang lebih merata, meskipun tantangan geografis masih ada.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mauni (2025), Penelitian berjudul Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur, menyimpulkan teknologi informasi berperan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas di Pemerintahan Daerah Jawa Timur, hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterbukaan informasi publik. Infrastruktur teknologi informasi yang baik menjadi pondasi utama dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi di sektor publik. Infrastruktur yang memadai memungkinkan instansi untuk menyediakan layanan informasi secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai platform digital.

Sejalan pula dengan penelitian Af dilati dkk. (2025), Dalam penelitiannya berjudul Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efektivitas Administrasi Publik di Indonesia, ditemukan bahwa teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas administrasi publik di Indonesia, baik dari sisi kecepatan layanan, ketepatan data, transparansi, maupun akuntabilitas birokrasi. Hal ini dikarenakan sistem informasi berbasis teknologi mampu meminimalisir hambatan komunikasi serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik.

Demikian pula dengan penelitian Angganten (2025) yang menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dalam penerapan e-government berbasis website merupakan salah

satu elemen kunci dalam penerapan e-government berbasis website, tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, seperti koneksi internet yang stabil, server yang andal dan sistem keamanan yang memadai, e-government tidak akan dapat berfungsi secara optimal dan dapat menyebabkan kendala dalam penyampaian layanan kepada masyarakat.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Auliya, Ariyani, dan Putri (2025), yang menunjukkan bahwa proses penyaluran informasi melalui website belum efektif dalam mencapai tujuan transparansi informasi publik. Meski website ini diharapkan mampu menjadi sarana komunikasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi di era digital, kenyataannya, sebagian masyarakat belum dapat mengakses dan memanfaatkan website secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan infrastruktur yang tersedia, kurangnya pelatihan aparatur, serta minimnya budaya transparansi dalam organisasi. Meskipun infrastruktur sudah memadai, namun belum digunakan secara optimal untuk mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Secara umum, tiga penelitian terdahulu mendukung temuan bahwa keberadaan dan kualitas infrastruktur teknologi informasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Infrastruktur yang baik memungkinkan pemerintah menyampaikan informasi secara cepat, terbuka, dan efisien. Namun, penelitian Auliya, Ariyani, dan Putri (2025) menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur tidak selalu menjamin keterbukaan informasi apabila tidak diimbangi dengan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta memperkuat keterlibatan mereka dalam memanfaatkan platform digital.

Dengan demikian, penguatan infrastruktur teknologi informasi perlu menjadi prioritas dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis digital.

Pengaruh Kemampuan Digital Aparatur terhadap Keterbukaan Informasi Publik

Selanjutnya, hasil analisis juga menunjukkan bahwa Kemampuan Digital Aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur yang memiliki kemampuan digital yang baik, seperti keterampilan menggunakan aplikasi e-government, pengelolaan media informasi publik, dan keamanan data akan lebih mampu

menjalankan fungsi pelayanan informasi publik secara efektif.

Aspek utama yang memperkuat pengaruh tersebut berdasarkan perkembangan terbaru tahun 2025: 1). Penguasaan Ekosistem ASN Digital, Sejak Tahun 2025, implementasi platform ASN Digital mewajibkan aparatur untuk memiliki literasi digital yang kuat guna mengelola siklus layanan kepegawaian dan publik dalam satu pintu. Kemampuan ini memastikan informasi yang disampaikan kepada publik lebih akurat dan terintegrasi; 2). Efektivitas e-Government, Aparatur dengan kompetensi digital yang mumpuni mampu mengoperasikan aplikasi *e-government* secara optimal, yang terbukti secara dominan meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi publik; 3). Peningkatan Keamanan Data dan Etika: Literasi digital aparatur mencakup kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara transparansi informasi dan perlindungan data pribadi dalam tata kelola pemerintahan digital; 4). Kecepatan dan Ketepatan Informasi, Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kemampuan digital memungkinkan aparatur menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dan berbiaya ringan, yang menjadi indikator utama keterbukaan informasi publik; 5). Adaptasi terhadap Perubahan Sistem Kerja, Aparatur masa depan dituntut memiliki *digital skills* yang kuat untuk memfilter informasi (menghindari hoaks) dan berpikir kritis, sehingga informasi yang dipublikasikan memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Nurun dan Yuniar (2025) melalui penelitian Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Indonesia, menyimpulkan bahwa digitalisasi pelayanan informasi publik dilingkungan pemerintah daerah di Indonesia merupakan proses strategis yang tidak hanya mengandalkan infrastruktur teknologi, tetapi juga bertumpu pada kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini kemampuan digital aparatur. Aparatur yang memiliki kemampuan digital memadai dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi, mengelola data publik secara transparan, serta berinteraksi dengan masyarakat melalui platform digital secara responsif.

Sejalan pula dengan temuan Amirulkamar (2024), dalam penelitian berjudul dampak literasi digital terhadap pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif etika, menemukan bahwa

kemampuan literasi digital dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik yang memastikan bahwa kepentingan masyarakat diutamakan dan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Demikian pula sejalan dengan temuan Windyaningrum dan Rubiayasih (2016) dalam penelitian berjudul Implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa pada Website Pemerintah Desa, menyimpulkan bahwa diperlukan literasi media bagi masyarakat maupun aparatur, sehingga implementasi keterbukaan informasi publik dan good governance melalui sistem informasi dapat terwujud. Temuan ini menegaskan bahwa aparatur dengan kompetensi digital yang baik mampu memanfaatkan teknologi untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Ath-Thariq dan Permana (2025) yang menyimpulkan bahwa pelayanan publik mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik, meskipun tingkat kemampuan digital aparat masih tergolong rendah terutama dalam pemanfaatan media sosial sebagai saluran informasi publik dan pengembangan sistem digital terpadu yang memadai.

Secara umum, hasil-hasil penelitian terdahulu mendukung bahwa kemampuan digital aparatur merupakan faktor penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Aparatur yang melek teknologi mampu mengelola data dan informasi secara transparan, mempercepat komunikasi publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, hasil penelitian Ath-Thariq dan Permana (2025) menegaskan bahwa literasi atau kemampuan digital tidak akan memberikan dampak nyata tanpa adanya motivasi, etika kerja, dan budaya transparansi di lingkungan instansi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai secara empiris, yaitu untuk membuktikan bahwa faktor teknologi yang berkualitas lebih baik, dan kompetensi aparatur yang memiliki literasi digital tinggi merupakan dua pilar utama dalam mendukung keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kota Palopo. Kedua variabel tersebut saling melengkapi, infrastruktur teknologi menyediakan sarana, sementara kemampuan digital aparatur memastikan sarana tersebut dimanfaatkan secara optimal.

Implikasi Hasil Penelitian dalam Perspektif Teori Pertumbuhan Ekonomi, Hasil penelitian ini memberikan gambaran strategis mengenai bagaimana transformasi digital di tingkat pemerintahan daerah berkontribusi pada penguatan ekonomi wilayah. Dalam kerangka Teori Pertumbuhan Endogen, pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak hanya bersumber dari akumulasi modal fisik semata, melainkan dari akumulasi pengetahuan dan kemajuan teknologi yang melekat pada sumber daya manusia.

Pertama, temuan mengenai pengaruh positif Infrastruktur Teknologi Informasi menegaskan bahwa teknologi berperan sebagai katalisator efisiensi. Dalam ekonomi modern 2025, infrastruktur digital yang andal berfungsi sebagai "jalan tol informasi" yang menurunkan biaya transaksi (*transaction costs*) antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ketersediaan akses data yang terbuka dan cepat melalui platform digital meminimalisir hambatan birokrasi, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif dan menarik bagi investasi di Kota Palopo.

Kedua, pengaruh signifikan dari Kemampuan Digital Aparatur memperkuat argumen mengenai pentingnya Modal Manusia (*Human Capital*). Teknologi secanggih apa pun tidak akan memberikan imbal hasil (*return*) ekonomi yang optimal tanpa kapasitas SDM yang mumpuni. Aparatur yang kompeten secara digital bukan sekadar operator sistem, melainkan agen inovasi yang memastikan data publik dapat diolah menjadi informasi yang bernilai guna. Peningkatan keterampilan digital ini merupakan bentuk investasi modal manusia yang mampu mendorong produktivitas birokrasi, yang pada gilirannya mempercepat akselerasi pembangunan daerah.

Ketiga, Keterbukaan Informasi Publik sebagai output dari integrasi teknologi dan SDM berperan sebagai pondasi bagi pembentukan institusi yang inklusif. Institusi pemerintah yang transparan dan akuntabel adalah syarat mutlak bagi kemakmuran ekonomi. Keterbukaan informasi menghilangkan ketimpangan informasi (*asymmetric information*) di pasar. Ketika publik dan pelaku usaha memiliki akses yang setara terhadap informasi perencanaan (*e-planning*) dan evaluasi (*e-monev*), kepercayaan publik meningkat dan risiko korupsi menurun.

Hasil penelitian ini juga memperkuat konsep good governance, khususnya prinsip transparansi. Infrastruktur teknologi informasi yang memadai

menjadi prasyarat utama agar informasi publik dapat diakses secara cepat, akurat, dan luas. Namun, infrastruktur saja tidak cukup. Aparatur yang memiliki keterampilan digital berperan sebagai penggerak utama dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Dengan literasi digital yang baik, aparatur mampu mengelola, menyajikan, dan menyebarkan informasi publik secara efektif, sehingga mempercepat terciptanya pemerintahan yang terbuka.

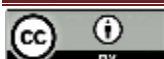
Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa instansi lingkup Pemerintah Kota Palopo perlu meningkatkan investasi pada infrastruktur teknologi informasi agar sistem pelayanan informasi publik dapat berjalan optimal, menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kapasitas digital aparatur secara berkelanjutan, serta melakukan upaya mengintegrasikan sistem informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai wujud nyata keterbukaan.

Secara keseluruhan, implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara infrastruktur TI dan kualitas digital aparatur di Kota Palopo bukan hanya sekadar urusan administratif, melainkan prasyarat fundamental untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien. Tata kelola yang baik adalah mesin penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing di era digital.

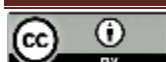
Investasi pada infrastruktur TI yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas digital SDM di Kota Palopo adalah investasi strategis jangka panjang. Hal ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan Palopo tetap relevan dan unggul dalam peta persaingan ekonomi digital nasional kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdilati, A. (2025). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efektivitas Administrasi Publik di Indonesia. 140–155.
- Amirulkamar, S. (2024). Dampak Literasi Digital terhadap Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Etika. *TheJournalish: Social and Government*, 5(1), 87–94. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/indexVol.5No.1>
- Angganten, T. A. (2025). Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Tapak Kabupaten Magetan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2), 186–194.



- Ath-Thariq, M., & Permana, Y..(2025). Potensi Literasi Digital dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Village. 01(08), 1264–1273.
- Auliya, A., Ariyani, L., & Putri, L. D.. (2025). Problematika Sistem Informasi Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik. 21(1), 31–56. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.738>
- Azka, H. N., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 6(1), 597–602.
- Bulutoding, L., & Amiruddin, A. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kinerja Sistem Informasi : Studi Pada Perbankan.
- Cahya, K., & Wibawa, S. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 2(2), 218–234.
- Chairunnisa, L. L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang. 11(02), 31–45.
- Damanik, E. O., Tarigan, W. J., Tampubolon, J., Simanjuntak, D. C. Y., Sihombing, S. D., Saragih, D. Y., ... & Simarmata, H. M. P. (2025). Digital Transformation of PT Pos: Customer Loyalty In The Era of Security and Data Technology. Jurnal Ekuilnomi, 7(2), 547-560
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). 10, 13–23. <https://doi.org/10.31504/komunika.v9i1.3750>
- Jati, K. (2022). Edukasi Manfaat Keterbukaan Informasi PublikData Perdagangan. Prosiding the 6th Seminar Nasional ADPI Mengabdi Untuk NegeriSeminar Nasional ADPI Mengabdi Untuk Negeri, 3(2), 1–12.
- Mauni, C. (2025). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur. 3(1), 104–115.
- Muhlizi, A. F. (2016). Penguatan Akses Informasi Publik Melalui Teknologi Informasi sebagai Bentuk Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara. 5.
- Nurun, A., & Yuniar, I.. (2025). Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Publik terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Indonesia. 2(2), 166–185.
- Putri, R. W. (2025). Efisiensi Pasar Dalam Teori Dan Praktik : Kajian Literatur Ekonomi Mikro. Economi And Business Management Journal (EMBJ), 4(1), 27–34. <https://www.ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/445/431>
- Qamaruddin, M. Y., & Iskandar, M. I. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan E-Absensi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Daera. 5(1), 210–219.
- Renanda, A. A., & Rosidin, A. (2025). Efektivitas Pelayanan Digital Dalam Mempermudah Birokrasi Dan Pengelolaan Data Publik. Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 1(8), 1651–1657. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i8.310>
- Riani, A. O., & Suseno, D. A. (2025). Pengaruh Infrastruktur, Teknologi, Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Per Kapita Dan Ketimpangan Pendapatan Pulau Jawa. Jurnal Ekuilnomi, 7(1), 230-239
- Ricky, & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). 12(2), 62–75.
- Ridwan, M., Patulak, L. E., & Lajaria, R. T. (2025). Implementasi Sistem Informasi Manajemen di Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat. 7(02), 198–205.
- Rosyid, M. (2014). Urgensi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Manajemen Pembangunan Ekonomi. BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 2(1), 77. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5251>
- Rusmana, A. (2003). Infrastruktur Teknologi Informasi pada Lembaga Pendidikan Kepustakawanan. 1–8.
- Saraswati, N. M. A. ., Widanti, N. P. ., & Dewi, N. D. . (2025). Peran Digital Mindset, Pemahaman Good Governance dan Kompetensi Digital Terhadap Pembentukan Smart ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. 12(September), 440–458.
- Sofwan. (2022). Urgensi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah. 37(1), 118–126.
- Windyaningrum, R., & Rubiyasih, A. (2016). Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa



Diskriminasi Implementasi Keterbukaan
Informasi Publik Melalui Pengembangan
Sistem Informasi Desa Pada Website
Pemerintah Desa. Indonesia Yang
Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi

